PROFIL INOVASI JAGA LAUT

A. RANCANG BANGUN

Inovasi dirancang melalui pembangunan sistem **JAGA LAUT (Jaringan Awasi Gerakan Aktivitas Laut)** sebagai media pengelolaan data pengawasan secara digital. Sistem ini didukung dengan penyusunan SOP, pembentukan tim efektif, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, inventarisasi wilayah rawan pelanggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara terintegrasi sehingga seluruh proses pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait bidang kelautan dan perikanan.
b. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.
c. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

2. Permasalahan

Sebelum inovasi dilaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, dimana realisasi kepatuhan tahun 2024 hanya mencapai **59,05%** dari target **90%**. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM pengawas, sarana prasarana, anggaran operasional, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, lemahnya koordinasi antar stakeholder, serta belum tersedianya sistem pengawasan yang terintegrasi.

3. Isu Strategis

Kondisi Saat Ini	GAP	Kondisi Existing
Belum Optimalnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Belum adanya Personil Polisi khusus Kelautan & Perikanan, Belum adanya pos pengawas, keterbatasan anggaran pengawasan	Tenaga pengawas tidak memiliki pelatihan yang cukup atau pemahaman yang mendalam tentang Pengawasan
Luasnya wilayah perairan yang harus diawasi	Tersebarnya pelaku usaha perikanan sehingga sulit dijangkau dalam pembinaan dan Pengawasannya	Minimnya pemanfaatan teknologi infromasi untuk pemantauan dan pengawasan di wilayah yang luas
Penerapan teknologi Infromasi terbatas	Masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet yang stabil.	Pengawasan kurang efektif dan efesien karena mengandalkan metode konvensional yang membutuhkan waktu dan SDM yang besar.
Sinergitas dengan Stakeholder belum Efektif	Kurangnya kolaborasi antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam penegakan	Adanya kepentingan yang berbeda-beda antara stakeholder, seperti pemerintah, nelayan, dan industri,

	hukum, sehingga tindakan sering terfragmentasi	yang mempersulit pencapaian kesepakatan
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya kelautan	Banyak nelayan yang masih menggunakan metode tradisional yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan atau jaring yang merusak habitat laut	Masyarakat mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, menggunakan metode penangkapan yang ramah lingkungan

4. Metode Pembaharuan

Kebaruan inovasi terletak pada penerapan sistem pengawasan digital **JAGA LAUT** yang mengintegrasikan data pengawasan, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, koordinasi antar stakeholder, monitoring, serta pelaporan dalam satu sistem. Sebelumnya pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi sehingga informasi sulit diperoleh secara cepat.

Pengaduan tindak pidana perikanan dapat di laporkan ke dalam sistem JAGA LAUT. Sistem mengelola data Pelapor, lokasi pengawasan, wilayah rawan pelanggaran, dan hasil monitoring sehingga dapat diakses sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun prioritas pengawasan, mempercepat koordinasi dengan stakeholder, serta mendukung pelaporan secara real time dan terdokumentasi dengan baik.

5. Keunggulan dan Kebaharuan

a. Berbasis teknologi informasi.
b. Data pengawasan terintegrasi.
c. Mempercepat koordinasi antar stakeholder.
d. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi.
e. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengawasan.
g. Mudah dikembangkan dan direplikasi pada wilayah lain.

6. Tahapan Inovasi/Penggunaan

a. Pembentukan tim efektif.
b. Penyusunan SOP pengawasan.
c. Koordinasi dengan stakeholder.
d. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan.
e. Inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan pelanggaran.
f. Pengembangan dan implementasi sistem JAGA LAUT.
g. Monitoring dan evaluasi.
h. Penyusunan laporan dan tindak lanjut pengembangan.

B. TUJUAN

1. Tujuan Jangka Pendek

a) Membangun Tim Efektif;
b) Membuat SOP Pengawasan;
c) Koordinasi Stakeholder;
d) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
e) Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi dengan stakeholder;
f) Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawasan;
g) Menginventarisir, mengidentifikasi dan memproses data Rawan Penyalahgunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
h) Penyediaan Sistem JAGA LAUT (Jaringan Awasi Gerakan Aktivitas Laut);
i) Monitoring dan Evaluasi;
j) Penyusunan Laporan.

2. Tujuan Jangka Menengah

Mengembangkan Metode Pengawasan yang lebih efisien dan responsif terhadap situasi yang berkembang

3. Tujuan Jangka Panjang

Merumuskan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan pengawasan, termasuk penggunaan tekonolgi dan kebijakan yang efektif.

C. MANFAAT

1. Diri Sendiri

Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan.

2. Organisasi

a) Meningkatkan Kinerja Organisasi UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
b) Terkelolanya Data Pengawasan Pengendalian Sumberdaya kelautan dan Perikanan Lebih Efektif, efesien, akuntabel dan Tersistem.

3. Pemangku Kepentingan

a) Tersedianya informasi Pengawasan SDKP berbasis Online
b) Terintegrasinya koordinasi program/kegiatan dalam Pengawasan SDKP

4. Masyarakat

Meningkatnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dengan pengawasan yang baik, Efektif, dan Pengeloaan yang tepat.

D. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai antara lain tersedianya sistem pengawasan berbasis digital, meningkatnya koordinasi antar stakeholder, tersusunnya SOP pengawasan, meningkatnya kapasitas SDM, tersedianya data pengawasan yang terintegrasi, serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.